

Dana Desa...

Untuk menghindari ketimpangan dana tersebut, sebanyak 90% atau Rp18,7 triliun akan dibagi rata untuk sekitar 74.093 desa di seluruh Indonesia. Dengan demikian untuk tahap pertama ini masing-masing desa akan mendapatkan Rp252 jutaan. Sedangkan 10% lainnya akan dibagi berdasarkan formulasi yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP). Jumlah ini jauh dari perkiraan semula yang dikabarakan satu desa bisa mendapatkan hingga Rp1,4 miliar.

Beban berat jelas ada di pundak kepala desa dan perangkatnya. Tak sedikit mereka yang mengalami gejala stres seperti mudah lelah, kebingungan, dan mudah jatuh sakit.

"Saya baru sibuk. Saya baru capek," ujar kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, Ani Widayani saat hendak ditanya soal kesiapan menyambut cairnya anggaran desa.

Namun tidak sedikit kepala desa yang menyatakan siap untuk melaksanakannya meski ada kekhawatiran jeratan hukum. Kades Dlingo, Bantul, Bahrun Wardoyo mengaku sudah tidak kaget dengan anggaran besar nanti. Pasalnya, pada 2014 lalu desa berjudulan Giriljoji ini sudah mengelola pendapatan mencapai Rp1,2 miliar untuk beberapa kegiatan pembangunan fisik non fisik.

Dlingo memperoleh Rp1,4 miliar untuk 2015 ini dan telah dirancang 70% untuk fisik dan 30% lainnya untuk kesejahteraan berupa tunjangan perangkat desa. "Bagaimana bisa dikatakan besar. Untuk 10 PAUD [pendidikan anak usia dini] saja masing-masing hanya dapat Rp1 juta. 64 RT masing-masing Rp100.000, remaja masjid Rp500.000. Jadi enggak perlu puyeng," kata dia.

Kepala Desa Wonosari, Gunungkidul, Tumija, meski mengaku

mengaku masih kesulitan membuat laporan keuangan, dia tidak khawatir sebab ini masih dalam proses transisi. Selain itu banyak program pendampingan yang dilakukan pemkab, sehingga bisa melakukan konsultasi demi terciptanya laporan yang baik dan benar.

Korupsi

Bibit Kustamta, Ketua Ismaya, Paguyuban Perangkat Desa Ismaya, dalam diskusi publik *Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Implementasi UU Desa Sabtu (28/2)* di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). mengatakan, desa butuh banyak pendampingan dari pemerintah kabupaten dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. "Korupsi itu antara lain disebabkan ketidaktahan, kuncinya harus ada pendampingan dan pembinaan," tutur mantan Kepala Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul itu.

Sebagian besar pemerintah desa di Kabupaten Kulonprogo telah siap menghadapi diterapkannya UU Desa. Bahkan, Bupati Kulonprogo Hastio Wardoyo menegaskan kabupaten ini telah menyelesaikan empat perda sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang tersebut.

Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kulonprogo, Sigit Susetya, mengatakan meski perda sudah disahkan. Namun, perlu penyesuaian pemahaman tentang aturan-aturan yang tercantum dalam UU Desa maupun perda yang ada.

Adapun Bupati Gunungkidul Badingan mengatakan Pemkab siap mem-back up desa dalam penggunaan dana desa. Pihaknya juga telah melakukan sejumlah pelatihan.

Bambang Hidayana, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSKK) UGM sekaligus Peneliti Institute for Research and Empowerment

(IRE) mengatakan dana sebesar itu masih jauh dari harapan. Awalnya, perjuangan dana desa itu Rp1,4 miliar per desa tapi karena proses politik dan pertimbangan negara, yang diberikan ke desa Rp250 juta.

"Tahun 2007 saja melalui ADD dari pemerintah Kabupaten, Desa Wukirsari terima sampai Rp200 juta. Desa lain pun ada yang mampu kelola Rp500 juta sampai Rp1 miliar," katanya.

Selain itu Bambang juga meminta desa bisa lebih kreatif dalam program pembangunan. Dana yang ada tidak dihabiskan untuk pembangunan fisik saja. "Gunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Misal melalui badan usaha milik desa yang tidak hanya sebagai sumber desa tapi perkuat koperasi desa. Juga dengan pemberdayaan masyarakat di bidang usaha mikro," katanya. (Holy Karlika NS/Bhekti Suryani)